
PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI KOTO ANAU TAPAN

Zul Ihsan Mu'arrif¹⁾, Zulkifli Nurdin²⁾, Dafiari Syarif³⁾, Alek Wissalam Bustami⁴⁾, Azhar⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kerinci
email: zulihsanmuarrif@iainkerinci.ac.id

Abstract

This research aims to determine the use of village budget funds for community empowerment. Various problems are being faced, such as welfare, public services, and fund management. The research was conducted using interviews and direct observation. The results show that fund management is carried out through deliberation in accordance with nagari customs. Most of the village funds are used for village operational costs which should be allocated to other activities. Aspirations as a form of deliberation also take the form of physical development because the level of education is still relatively low. So the expected solution includes providing education for the community so that they can get ideas that can advance their region. This is an important note for the nagari to prioritize education by creating several education-oriented programs so that it is hoped that the village funds distributed can answer every community need.

Keywords: Village Funds; Development; Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Berbagai masalah yang sedang dihadapi seperti kesejahteraan, pelayanan publik, serta pengelolaan dana. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung kepalangan. Hasil menunjukkan pengelolaan dana dilakukan dengan hasil musyawarah sesuai dengan adat istiadat nagari. Sebagian besar dana desa digunakan untuk biaya operasional desa yang seharusnya dapat dialokasikan kepada kegiatan yang lain. Aspirasi sebagai bentuk musyawarah juga berbentuk pembangunan fisik karena tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah. Sehingga solusi yang diharapkan diantaranya dengan memberikan pendidikan bagi masyarakat agar mendapatkan pemikiran yang dapat memajukan wilayahnya. Hal ini penting menjadi catatan bagi pihak nagari untuk memprioritaskan pendidikan dengan menciptakan beberapa program yang berorientasi kepada pendidikan sehingga diharapkan dana desa yang disalurkan dapat menjawab setiap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Dana Desa; Pembangunan; Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nagari mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pernagari dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan nagari pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga nagari memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan nagari. Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Nagari meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD bersumber dari Dana Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Nagari yang besarnya kurang lebih 10 % (sepuluh persen). Sehingga dengan adanya undang-undang yang telah diterbitkan diharapkan pengelolaan dana desa menghasilkan manfaat bagi masyarakat yang berada dilingkungan nagari. Namun, meskipun setiap nagari mendapatkan pendanaan dari pemerintah, nagari masih menghadapi berbagai masalah seperti pendapatan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan tidak memiliki keselarasan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada nagari salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi nagari yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah nagari yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari serta bagaimana faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat nagari di nagari koto anau tapan kecamatan basa ampek balai kabupaten pesisir selatan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- 1) Nagari memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari (apbnag) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
- 2) Kesejahteraan masyarakat nagari yang rendah sehingga sulit bagi nagari mempunyai Pendapatan Asli nagari (apbnag) yang tinggi.
- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional nagari untuk menjalankan pelayanan publik.
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke nagari akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mendulang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses

3. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Nagari koto anau tapan kecamatan basa ampek balai Kabupaten pesisir selatan, sedangkan situs penelitian adalah pemerintah Nagari Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Nagari. Fokus dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat nagari, yang terdiri dari: Perencanaan ADD, Penganggaran ADD, Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD, Penggunaan ADD, Pengawasan ADD, dan Pertanggung jawaban ADD. *Kedua*, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Nagari dalam pemberdayaan masyarakat nagari

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan siklus 1

Pada tahap ini adalah tahap perencanaan pengabdian yaitu dengan melakukan pengenalan diri pada aparat nagari dan masyarakat nagari koto anau tapan. Untuk bisa melakukan kegiatan selanjutnya perizinan dilakukan kepada wali nagari dan aparat nagari untuk melakukan

kegiatan. Dengan ini, dibutuhkan bantuan dari wali nagari dan aparat nagari koto anau tapan untuk melakukan kegiatan penelitian di nagari koto anau tapan. Dengan bantuan dari wali nagari dan aparat nagari yang bersedia memberikan izin dan sekaligus sangat berperan penting dalam kegiatan penelitian yang sedang dilakukan di nagari koto anau tapan, hingga mendapatkan hasil yang di inginkan.



Gambar 1. Wawancara kepada aparat nagari tentang alokasi dana desa

Kegiatan siklus 2

Pada tahapan siklus 2 ini dilakukan dengan langsung turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan pada pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan irigasi nagari. Sekaligus di melakukan wawancara terhadap bapak-bapak yang bekerja di situ mengenai kebutuhan-kebutuhan, bagaimana sistem pengerjaannya dan juga mengenai upah dalam pembangunan irigasi tersebut.



Gambar 2. Melakukan wawancara dengan pekerja irigasi

Kegiatan siklus 3

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat nagari koto anau tapan kecamatan basa ampek balai tapan kabupaten pesisir selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam

kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjaringan aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat



Gambar 3. peninjauan hasil dari pembangunan irigasi nagari

5. KESIMPULAN

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah nagari atau rembug nagari. Pada nagari Koto anau tapan, musyawarah nagari dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari (APBNag), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrembangnag) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada nagari koto anau tapan dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah nagari.

Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah nagari disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di nagari, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD nagari koto anau tapan sejumlah Rp. 204.611.000- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah nagari.

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada nagari koto anau tapan yaitu sejumlah Rp. 204.611.000 Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian BLT, program bedah rumah dan program infrastruktur nagari. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer.

6. REFERENSI

- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022a). *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)*. Penerbit Qiara Media.
- Khusairi, H., & Sarmigi, E. (2022b). *The Effect of Tuai Padi Culture and Religiosity on The Public Welfare in Kerinci Regency*. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(2), 289–305.
- Refika Aditama, Sumaryadi, I Nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sarmigi, E. (2020). Analisis pengaruh Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Al-Dzahab: Journal of Economic, Management and Business, & Accounting*, 1(1), 1–17.

- Sarmigi, E., Ayudia, W., & Putra, F. E. (2022). AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 3(02), 1–10.
- Sarmigi, E. (2022). Gerakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Pendidikan Di Era Covid-19. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah*, 2(1), 24–35.
- Sugiono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung, Alfabet.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT. Gunung Agung.